



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN

NOMOR : W12.46.PR.01.03 Tahun 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DAN TURUNAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun rencana kerja dan turunannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Penetapan Rencana Kerja dan Turunan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DAN TURUNAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja dan Turunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang selanjutnya disebut Renja dan Renja Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

KEDUA : Renja dan Turunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Serang Pada
tanggal 30 Maret 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH



AGUS TOYIB
NIP 196306171985031002



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BANTEN

NOMOR : W12.46.PR.01.03 Tahun 2021

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
DAN TURUNAN DI LINGKUNGAN KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN

RENCANA KERJA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Anggaran
			2021	
DIVISI ADMINISTRASI				
(1)	(2)	(3)	(4)	
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3.1	15.531.727.000,-

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target	Anggaran
			2021	
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM				
(1)	(2)	(3)	(4)	
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase Kegiatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	2.066.480.000,-
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	70%	199.428.000,-
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	2 Kegiatan	98.001.000,-

Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	77%	2.125.755.000,-
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif		20%	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	2 Instansi Pemerintah	233.984.000,-
	2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM		1 Instansi Pemerintah	
	3. Jumlah instansi pemerintah yang menindak lanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM		2 Instansi Pemerintah	
Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		3 Rekomendasi	
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	126 Layanan	930.915.000,-
	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		1 Lokus	
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	
	2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah		1 Kegiatan	

	3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		2 Laporan	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	80%	262.000.000,-
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		12 Orang	

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target	Anggaran
			2021	
DIVISI PEMASYARAKATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80	1.126.980.000,-

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target	Anggaran
			2021	
DIVISI IMIGRASI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	3,15	786.225.000,-
	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	
	3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
DIVISI ADMINISTRASI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang transparan dan <i>akuntable</i> berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Perkantoran	1 layanan	Program Dukungan Manajemen/ Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	12.297.336.000
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2 layanan		306.207.000
	Layanan Umum	1 Layanan		335.950.000
	Layanan Sarana Internal	28 unit		142.346.000
	Layanan Prasarana Internal	6 unit		1.411.000.000
	Layanan SDM	1.617 orang		183.408.000
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan		157.060.000
	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2 Layanan		283.754.000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	79.450.000		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan HAM	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3 Rekomendasi Kebijakan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	833.360.000
	Koordinasi	15 Kegiatan		115.370.000
	Pelayanan Publik Lainnya	6 Layanan		962.730.000
	Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara		2.460.000
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6 Lembaga		152.560.000
Berkurangnya pelanggaran hukum dibidang keimigrasian dan HKI	Sosialisasi dan Diseminasi	1.200 orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	715.075.000
	Pelayanan Publik Lainnya	126 Layanan		36.200.000
	Pemantauan Produk	2 Laporan		179.640.000
Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	32 Rekomendasi Kebijakan	Program Pembentukan Regulasi/ Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	240.807.000
	Standarisasi Profesi dan SDM	12 Orang		21.193.000
Terimplementasinya kebijakan, penghormatan,	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3 Rekomendasi Kebijakan	Program Pemajuan dan Penegakan HAM/ Penyelenggaraan	103.233.000
	Koordinasi	2 Kegiatan		63.440.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	Pemajuan HAM di Wilayah	56.630.000
	Data dan Informasi Publik	1 Layanan		10.681.000
Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	Program Pembentukan Regulasi/ Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	98.001.000
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5 Lembaga	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	97.293.000
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12 Kelompok Masyarakat		155.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	17 Lembaga		112.052.000
	Akreditasi Lembaga	17 Lembaga		100.000.000
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	177 Orang		1.416.000.000
	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	23 Kelompok Masyarakat		245.410.000
Terimplementasinya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi Manusia (RAN HAM)	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	Program Dukungan Manajemen/ Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	199.428.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
DIVISI IMIGRASI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik di tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota	Koordinasi	11 Kegiatan	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	587.248.000
	Operasi Bidang Keamanan	13 Operasi		198.977.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
DIVISI PEMASYARAKATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan	Koordinasi	10 Kegiatan	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	343.770.000
	Sosialisasi dan Diseminasi	68 Orang		566.170.000
	Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi		217.040.000

TURUNAN RENCANA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2021

KANTOR WILAYAH	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat termasuk penanganan pengaduan dan penerapan <i>Whistleblowing system</i> (WBS) dengan menggunakan pengembangan IT atau <i>e- Government</i>, survey kepuasan masyarakat;2. Melakukan evaluasi dan menyusun standar pelayanan (SOP)3. Peningkatan Kapasitas SDM melalui implementasi <i>Corporate University</i> dan pelatihan <i>softskill</i> pelayanan budaya prima;4. Realisasi anggaran tiap triwulan sesuai dengan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan;5. Bersama-sama mewujudkan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten menjadi urutan 5 besar Kanwil terbaik;6. Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi dan pembangunan Zona Integritas kepada pegawai dan masyarakat;7. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan SPIP;8. Integrasi pengaturan kegiatan, kebutuhan kehumasan dan TimProtokoler;9. Menyusun dan menerapkan sanksi moral dan disiplin sesuai ketentuan;10. Menerapkan <i>reward</i> bagi pegawai berdasarkan capaian kinerja dan disiplin;11. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan instansi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Kanwil di Wilayah;12. Pemberian informasi terkait bebas pungli kepada seluruh pegawai di UPT Pemasaryakatan secara berkesinambungan;13. Peningkatan kapasitas SDM berupa gerakan revolusi mental melalui kegiatan senam sehat dan Jumat Taqwa;14. Meningkatkan kapasitas teknis SDM Operator Sistem Informasi melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan (operator SMART, E-Performance, Monev Bappenas, SIMAK BMN, SAIBA,SAKTI, SIMPEG, SISUMAKER, SDP);15. Penguatan Kualitas Sistem APOA di wilayah16. Meningkatkan pelayanan Pendaftaran Permohonan Paspor dan Izin Tinggal secara online;17. Meningkatkan pelayanan Pendaftaran Permohonan Paspor secara online;18. Memaksimalkan Unit Layanan Paspor Simpatik, dan Eazy Passport;19. Mendorong operasional pelayanan keimigrasian di Wilayah
----------------	---



Ditetapkan di Serang Pada
tanggal 30 Maret 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH

AGUS TOYIB
NIP 196306171985031002